

Nation and Character Buildings Indonesia

Gumilar Rusliwa Sumantri¹

Negara yang terbaik

“Pada apanya dapat kukenal negara yang terbaik?”

Sama seperti kaukenal wanita yang terbaik

Pada kenyataan, sahabatku,

Bahwa kita tidak membicarakan keduanya

(Schiller 1753-18505, Epigramme dikutip dari Damshäuser dan Ramadhan KH, 1989,

„Malam Biru di Berlin”)

Wacana mengenai wujud dan jatidiri bangsa (*Nation and Character Buildings*) Indonesia tampaknya urgen untuk dikedepankan kembali. Terutama hal ini bertalian dengan berlalunya klimaks proses politik di MPR Oktober 1999 lalu yang masih menyisakan persoalan pelik seputar integrasi bangsa. Salah satunya adalah keinginan rakyat Aceh untuk “merdeka” melalui referendum, demikian pula dengan kawasan lain yang selama ini terpinggirkan dalam panggung politik nasional mulai mendengarkan tuntutan serupa. Persoalan ini seperti buah simalakama. Jika sekali dilakukan referendum kemerdekaan, “bangsa” ini akan berakhir dengan cerai berai. Demikian pula jika tuntutan referendum tidak “didengar”, gelombang resistensi masih akan timbul dimana-mana. Jika hal ini dibiarkan terus berlarut-larut, kegelapan masih akan menyaputi masa depan “bangsa”. tampaknya salah satu jalan “terjal” yang dapat ditempuh adalah mencari terobosan penyelesaian politik melalui dialog empatis yang sungguh-sungguh. Langkah ini akan bermakna apabila diletakkan pada konteks pemahaman wacana keadilan, demokrasi dan liberalisasi yang proporsional. Selain itu, setiap tahapan kemajuan langkah ini akan bersifat sementara dan rentan, jika tidak dibarengi pemupukan wujud dan jatidiri bangsa Indonesia yang berdimensi sosial jangka panjang. Dapatkah Gus Dur bercermin pada fakta bahwa persoalan potensi disintegrasi kini, merupakan produk historis gagalannya negara bangsa ditegakkan, sebagai problematik konstruksi sosial pada masa rejim-rejim

¹ Dr. Gumilar Sumantri adalah dosen Jurusan sosiologi dan Pascasarjana UI, wakil direktur eksekutif Pusat Studi Jepang UI, November 1999 hingga akhir Januari 2000 menjadi peneliti/pengajar tamu pada Universitas Bonn dan Universitas Bielefeld, Jerman atas dukungan DAAD.

sebelumnya berkuasa?

Negara Bangsa Sebagai Problematik Konstruksi Sosial

Konsep bangsa (*nation*) secara umum dapat dipahami sebagai "a community of people composed of one or more nationalities with its own territory and government (Webster's New Encyclopedic Dictionary 1996). Dalam diskursus sosiologis konsep bangsa ini biasanya dikaitkan dengan gejala negara bangsa (*nation state*) (lihat Giddens 1995). Jarry dan Jarry (1997) mengemukakan bahwa negara bangsa tidak lain adalah bentuk modern dari negara (*state*). Dalam hal ini, batasan negara dan masyarakat "cenderung", namun tidak selalu, bersifat koekstensif. Maksudnya, pada umumnya wilayah yang diklaim suatu negara bertalian erat dengan pembagian budaya, etnik dan linguistik. Hal ini berkaitan erat dengan apa yang seorang sosiolog Walzer (1981) ungkapkan, bahwa keanggotaan dalam suatu masyarakat politik merupakan kebutuhan alamiah manusia. Smelser (1997) melanjutkan pernyataan ini dengan pertanyaan, "But which human community? Which political society?". Smelser mendiskusikan keanggotaan seseorang dalam masyarakat politik dengan mengindahkan perkembangan dunia global yang ditandai adanya fluiditas dari batas-batas sosio-kultural (cf. Featherstone 1994). Ia mengingatkan pula bahwa tradisi dalam ilmu sosial yang menjadikan negara sebagai unit dasar analisa tidaklah selalu tepat. Tidak kurang dari Agnew (1989) melontarkan kritik tajam pada Weber, Marx dan Durkheim yang dianggapnya sebagai "methodological nationalists", yang menerima "state boundaries as co-extensive with those of the 'societies' or 'economies' they were interested in studying". Sehingga, para pendiri sosiologi ini dianggap gagal menempatkan negara bangsa sebagai problematik konstruksi sosial.

Tampaknya, dalam pandangan Smelser (1997), untuk terbentuk suatu negara bangsa yang merupakan bagian dari problematik konstruksi sosial, diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terdapat *territorial integration*, yaitu suatu kawasan yang memungkinkan orang untuk berinteraksi terus-menerus dalam ruang dan waktu tertentu dan menumbuhkan sebuah *shared attachment to place*. Kedua, *kinship integration* tumbuh subur melalui ikatan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda melalui perkawinan, kedekatan emosional, serta bentuk ikatan lain yang mampu mengurangi

potensi konflik. Ketiga, terdapat integrasi ekonomi yang mengikat orang-orang dalam proses pertukaran dan pasar. Keempat, tercipta integrasi politik, yaitu suatu proses yang merupakan “*the bringing together of the people who may be separated territorially or culturally under a central government*”. Pemerintah pusat dituntut dalam hal ini menyatukan orang-orang dalam sistem keadilan, administrasi fiskal dan pendapatan yang “benar”, aliansi politik yang diterima bersama, bahkan rekrutment proporsional untuk memasuki dinas militer. Kelima adalah integrasi kultural. Integrasi ini menyatukan orang-orang melalui suatu *shared belief* dalam sistem nilai, norma, simbol, ritual dan sejarah bersama.

Kelima prasyarat integratif di atas terjalin satu sama lain sebagai suatu proses sosial yang akan melahirkan wujud dan jati diri suatu negara bangsa. Entitas dan identitas yang dipahami, dikonstruksikan dan direkonstruksikan secara sosial sepanjang sejarah. Dan secara sosiologis, suatu negara bangsa dapat dibentuk dari aneka ragam komunitas dengan bahasa, kebudayaan dan tradisi yang beraneka ragam. Hal yang perlu dikedepankan di sini, kebijakan politik suatu rejim sentralistik pada masyarakat pasca kolonial biasanya mempengaruhi hasil konstruksi sosial ini. Sehingga, persoalan di seputar integrasi dan disintegrasi sangat terkait dengan aspek politik suatu rejim pada masa tertentu, dan bagaimana persoalan ini terus direkonstruksi di masa berikutnya. Misalnya ketidakpuasan suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap perilaku rejim yang tidak adil, korup dan otoriter; dapat berlanjut terus ketika rejim tumbang dan digantikan dengan yang baru, sepanjang persoalan pokok tidak diselesaikan dengan memuaskan.

National and Character Buildings Indonesia Pasca Penjajahan

Soekarno, salah seorang proklamator Indonesia, pada awal 1960-an dalam bukunya “*Di Bawah Bendera Revolusi*” mengedepankan istilah *National and Character Buildings* (Soekarno 1962). Ia memahami konsep ini dalam konteks yang spesifik. Yaitu, di tengah semangat anti kolonialisme merebak hebat. Meminjam istilah McGee (1981), para elit politik pada masa ini tengah memainkan peranan sebagai *custody* dari bangsanya yang baru lepas dari cengkeraman penjajahan. Masyarakat pada era ini secara substansial mewarisi ciri dan pola kehidupan sosial-politik dan ekonomi era penjajahan (lihat Alavi

1982). Di tengah konteks seperti ini, para politisi masih berusaha mencari pengertian dan justifikasi wujud dan jati diri negara bangsa Indonesia.

Perhatikan apa yang dikatakan Soekarno: "Perdjoangan membebaskan Irian Barat merupakan dasar fundamental daripada Nationalbuilding kita, bahkan djuga satu dasar fundamental daripada *Character Buildings* Indonesia". Selanjutnya ia merumuskan karakter "orisinik" bangsa Indonesia secara singkat yaitu: jauh dari oportuniste, duplikasi dan pengabaian martabat bangsa. Di sini ia tampak jelas terpukau oleh ungkapan moralis "*A nation with character is worth to live for, is worth to sacrifice for*". Menurut Soekarno, jauh sebelum "*Sturm ueber Asien*" menderu-deru di angkasa Timur, bangsa Indonesia telah mencamkan makna ungkapan di atas. Katanya "Itulah sebabnya kita djuga membantu perdjoangan lain-lain bangsa yang menentang kolonialisme...".

Dari uraian di atas, Soekarno secara implisit berpendapat bahwa wujud bangsa Indonesia dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke telah terbentuk secara sosio-historis jauh sebelum sumpah pemuda 1928 dikumandangkan. Ketika berhadapan dengan kekuasaan kolonial Belanda di Irian Barat, ia terkesan ingin menuntaskan perdebatan mengenai jangkauan geografis pengertian "negara bangsa Indonesia" melalui aspek pengalaman "historis" pra dan masa kolonial. Sehingga ketika ia dihadapkan pada fakta struktur multikultur masyarakat Indonesia, ia dan kawan-kawan keluar dengan solusi ungkapan *bhineka tunggal ika*. Singkat kata, Soekarno berupaya menengahkan argumen bahwa, klaim teritorial dari bangsa Indonesia masih sejalan dengan logika umum munculnya *statehood* yang mengikuti keberadaan *nationhood*. Perdebatan mengenai wujud dan jati diri bangsa pada masa tersebut untuk sementara relatif "tuntas" dalam pengertian diterima secara luas oleh pelbagai bagian masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

Namun sayang sekali, di tingkat realitas masa rejim masa itu gagal "memupuk" negara bangsa Indonesia sebagai problematik konstruksi sosial. Terdapat dua persoalan yang mengganjal pada waktu itu. Pertama adalah kondisi masyarakat secara sosial dan ekonomi carut marut akibat lama tenggelam dalam sumur penjajahan. Kedua adalah euforia politik Soekarno yang diletakan pada frontir anti barat bersifat kontraproduktif bagi dicapainya dinamika "kemajuan", keadilan dan demokratisasi. Integrasi wilayah, yaitu adanya suatu kawasan yang memungkinkan orang-orang untuk berinteraksi terus

menerus dalam ruan tertentu dan menumbuhkan sebuah *shared attachment to place* tidaklah dapat tercapai pada masa ini akibat infrastruktur komunikasi dan perhubungan yang minimal. Sementara itu, meskipun elit politik seperti Soekarno dan Hatta merepresentasikan diri sebagai warga negar yang melakukan ikatan dengan kelompok ethnias yang berbeda melalui perkawinan, pada tataran masyarakat pada umumnya kedekatan emosional tidak tercapai. Prasangka ethnias yang merupakan bagian dari warisan strategi politik adu domba Belanda masih melekat dalam pergaulan nyata antar kelompok.

Integrasi ekonomi yang mengikat orang-orang dalam proses pertukaran dan pasar berjalan tersendat akibat isolasi antar daerah maupun internasional. Integrasi politik ditandai oleh kenyataan bahwa pemerintahan gagal menegakan birokrasi yang bersih dan “perimbangan adil” pendapatan pusat-daerah. Sementara itu aliansi politik diguncang oleh fragmentasi kekuatan antara partai-partai besar bahkan militer. Sementara itu, demokrasi dipasung dengan mengedepankan argumen kebudayaan luhur bangsa. Meskipun kesamaan bahasa dan pengalaman sejarah nasional difahami relatif luas, wujud kebudayaan nasional masih merupakan suatu misteri pada masa ini. Sebagai akibat kegagalan ini masa pemerintahan Soekarno ditandai oleh gerakan separatis di Sumatera, Sulawesi, Maluku bahkan di Jawa sendiri. Gerakan ini ditumpas secara represif-militeristik dan telah menorehkan catatan pelanggaran hak asasi manusia dalam lembaran sejarah bangsa.

National and Character Buildings Indonesia Era Peralihan

Setelah rejim Soekarno tumbang melalui kudeta “misterius”, munculah masyarakat era peralihan (lihat Anderson 1986). Yaitu, saat Soeharto dan Habibie berkuasa. Rejim yang terakhir disebut dapat dikatakan sebagai puncak masa peralihan yang menjadi penutup peradaban masyarakat Indonesia pasca kolonial. Ciri dari masyarakat peralihan ini tipikal, yaitu masih kental mewarisi aspek pasca kolonial, namun telah mendapat orientasi baru. Sebagai contoh dari sisi wujud dan jati diri bangsa. Masyarakat dan rejim baru berpijak pada hal yang sama dengan pendahulunya dalam hal memahami wujud bangsa Indonesia. Yaitu, konstruksi sosial yang berlangsung sejak pra

hingga pasca kolonial. Dalam hal ini, bangsa Indonesia dimengerti terdiri dari aneka ‘bangsa’ yang menempati wilayah dari Sabang hingga Merauke, yang disatukan dalam satu pemerintahan pusat. Namun, dalam hal jati diri bangsa rejim ini berusaha memunculkan hal baru yang membedakan mereka dengan pendahulunya. Terutama setelah kolonialisme bukan lagi menjadi issue yang efektif untuk menyatukan wilayah yang demikian luas. Rejim Soeharto muncul dengan jargon “pembangunan” yang dapat diinterpretasikan sebagai arah dari pembentukan jati diri bangsa.

Secara idealistik tampaknya jati diri bangsa dipahami sebagai bersifat hirau pada pembangunan demi kemajuan, namun tetap berpijak pada akar budaya warisan nenek moyang. Disadari bahwa proses pembangunan di segala bidang dengan tulang punggung ekonomi, akan membawa dampak kepada kemakmuran dan kesentosaan bersama, yang selama masa pemerintahan Soekarno terabaikan. Jadi tidaklah aneh apabila jargon ini pada mulanya diterima secara antusias dengan penuh harapan oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Liberalisasi ekonomi pada awal tahun 1970-an membawa dampak nyata pada perbaikan hidup kebanyakan masyarakat. Sehingga gelombang ketidakpuasan “daerah” pada pemerintah pusat dapat diredam. Namun keadaan di atas hanya bertahan kurang lebih satu dekade, yaitu hingga akhir tahun 1970-an. Pada tahun-tahun kemudian, ketika ketidakadilan dan penafian prinsip demokrasi oleh struktur otoriter dan represif merajalela, bibit ketidakpuasan dan disintegrasi mulai menampakkan diri. Kian memuncak pada era krisis 1997-1999.

Hal di atas tampaknya berkaitan dengan langkah politik Soeharto yang sejak awal berkuasa dengan “jargon” pembangunan secara sentralistik dan mendewakan pemacuan pertumbuhan ekonomi atas segala biaya termasuk kebebasan (Bresnan 1991). Ia berpendapat kue yang besar perlu dibuat terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada segmen-segmen masyarakat. Filosofi pembangunan semacam ini kurang peka terhadap pemerataan, keadilan dan demokrasi. Apalagi struktur masyarakat pada waktu itu masih mewarisi keadaan rejim sebelumnya yaitu semu, korup dan rapuh seperti tampak pada lapangan korporasi ekonomi, kolektif birokrasi dan militer, dan sebagainya. Struktur seperti ini menggerogoti kue yang tengah dibangun sehingga tidak pernah menjadi “besar” seperti yang dicita-citakan. Sementara itu, kelompok-kelompok strategis yang muncul sebagai dampak adanya kesempatan-kesempatan sosial-ekonomi baru, menjadi

instrumen rejim untuk mengendalikan kerajaan ekonomi dan politiknya (lihat Evers dan Schiel 1982). Sehingga tidaklah mengherankan apabila proses pasar, efisiensi birokrasi, profesionalisasi dan mekanisme politik bersifat distorsif.

Hal ini kian memburuk keadaan struktur masyarakat, meskipun secara kasat mata agak tersembunyi di balik kamufase pertumbuhan ekonomi. Hasil pembangunan yang nyata pada awal tahun 1980-an adalah mulai munculnya gambaran masyarakat Indonesia yang secara kuantitatif menampakkan “kemajuan”, namun secara kualitatif ditandai oleh ketimpangan multi “dimensi”. Misalnya dalam kota terdapat perbedaan nyata antara “*the silent*” majority yang miskin yang tinggal di permukiman kumuh, dan sejumlah kecil kelas orang yang kaya yang menempati kawasan dan tempat tinggal mewah. Sementara itu ketimpangan tampak ketika kita membandingkan desa dengan kota, Jawa dengan luar Jawa, bahkan kawasan Barat Indonesia dan kawasan Timur.

Di tengah ciri pembangunan ekonomi dan struktur masyarakat yang dikemukakan di atas, kita tidak dapat berharap banyak akan pengembangan negara bangsa Indonesia sebagai problematik konstruksi sosial. Integrasi teritorial dilakukan dalam kerangka yang keliru, yaitu dengan menggandengkannya pada kepentingan ekonomi negara maupun korporasi. Misalnya pembukaan jalan baru lintas Irian, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian secara riil tidak bertumpu pada kebutuhan warga setempat, namun lebih merepresentasikan kepentingan para pengusaha yang merupakan kroni dan keluarga para penguasa. Jaringan transportasi di Riau atau Aceh yang diklaim rejim dan pengusaha maju secara dramatis, ditanggapi dengan cibiran dari masyarakat setempat. Mereka berpendapat jalan dan jembatan dibangun sepanjang ia berguna bagi mobilitas dan proses produksi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan minyak bumi milik perusahaan asing atau nasional. Jadi mereka merasa bahwa wilayah sosio-geografisnya hanya menjadi “hinterland” bagi ekspansi kapital kepentingan ekonomi tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan peraihan perbaikan hidup mereka.

Secara ekonomi mereka merasakan bahwa integrasi pada pasar menjadikan mereka kian miskin, karena sumber daya tersedot lebih banyak ke pusat secara kurang dapat dipertanggungjawabkan secara sistemik. Sebagai contoh dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Pada mulanya tidaklah ada keberatan dengan pengertian konstitusional yang menyatakan ia milik dan harus dikelola demi kemakmuran bersama.

Apa yang tidak dapat mereka terima adalah kekayaan alam dieksplorasi dengan sistem kerjasama yang tidak masuk akal dan korup. Sebagai contoh Freeport di Irian, Arun di Aceh, Caltex di Riau, dan sebagainya dipersepsi kurang menyumbang pada jumlah kekayaan negara. Pertama adalah akibat sistem yang dibuat melalui hubungan kolusif yang bermuara pada jumlah persentase bagian negara yang kecil. Kedua adalah sistem keuangan negara yang penuh kebocoran dan tidak transparan menjadikan bagian kecil di atas makin menipis. Sehingga kekayaan yang berasal dari sumber alam tersebut tidak berdampak sedikit pada kemakmuran kas negara apalagi daerah. Barangkali kas perorangan-perorangan tertentu kian membengkak, lalu diparkir di luar negeri sebagai upaya cuci uang.

Sementara itu secara politik, seringkali banyak daerah terabaikan dalam proses aliansi nasional. Hal ini karena tipikal rejim masa itu yang merekrut orang-orang dari kalangan yang tidak mewakili komunitasnya, kecuali berguna sebagai instrumen kontrol dan represi pemerintah pusat atas tuntutan yang dianggap tidak sejalan dengan “proyek” raksasa yang bernama “pembangunan”. Hal senada terjadi dalam lapangan sosial dan kultural. Proses integrasi pada lapangan ini lebih sering dicurigai sebagai instrumental dari dominasi dan hegemoni kebudayaan Jawa terhadap non-jawa. Hal ini salah satunya terkait dengan terabaikannya keadilan sosial, politik dan ekonomi seperti dibahas di atas. Singkat kata, proyek raksasa “pembangunan” pada era ini, ditandai oleh fakta bahwa “kemajuan” sama sekali tidak berkorelasi positif dengan demokrasi, kebahagiaan dan kemerdekaan (lihat Habermas 1991).

Tampaknya rejim Soeharto pada masa itu “menyadari” dampak pembangunan yang sifatnya korosif pada bangunan bangsa seperti diwakili dengan mulai tumbuh kembali gerakan separatisme di beberapa daerah. Selain menyelesaikan gerakan “makar” di atas secara bersenjata seperti dibentuknya daerah-daerah operasi militer (DOM), dilakukan pula upaya terlembaga guna membentuk wujud dan jati diri bangsa. Diyakini secara keliru oleh arsitek Orde Baru, bahwa wujud dan jati diri bangsa dapat ditempa melalui panataran agar toleransi dan integrasi dapat menyertai keberadaan manusia Indonesia yang membangun. Misalnya program P4 dapat dilihat dalam ceruk ini. Dan yang paling tragis lagi, secara implisit, langkah ini mencerminkan *set-back*, yaitu mencerminkan adanya pengakuan terhadap pembentukan *nationhood* yang dipaksakan,

yaitu mengikuti keberadaan *statehood*. Pada masa Soekarno hal ini telah dituntaskan secara elegan, meskipun gagal untuk “dipupuk” melalui proses sosial yang tepat.

Secara kritikal kita pun dapat menafsirkan, bahwa program-program pengembangan dan sosialisasi “nilai-nilai” bangsa secara artifisial tersebut merupakan bentuk pengalihan atas ketidakmampuan rejim Orde Baru dalam mendistribusikan hasil pembangunan secara adil dan merata, menegakkan birokrasi yang bersih, pengembangan kebudayaan yang mereflesikan “sekularisasi” nilai inter komunal dan sebagainya. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, program monolog sosio-politik di atas lebih berdimensi instrumental bagi pengukuhan status-quo dan bertentangan dengan nafas rasionalisasi yang membuka cakrawala berfikir kreatif dan kritis (Habermas 1994). Pada masa pemerintahan Habibie yang singkat, terdapat perbaikan dari segi pengembangan wacana demokrasi dan kebebasan. Namun, tetap ia pun tidak mampu memecahkan akar persoalan sosiologis integrasi bangsa meskipun yang bersifat mendesak dalam rentang singkat kepemimpinannya. Misalnya pemerintahan ini gagal menegakkan pemerintahan yang bersih, efisien dan bertanggungjawab. Jadi, dua rejim di masa peralihan ini secara umum dapat dikatakan telah gagal pula dalam menegakkan negara bangsa sebagai suatu problematik sosial dalam tatanan masyarakat yang adil dan demokratis.

Akhir *Post Colonial Society* : Dapatkah Gus Dur Menyimak Sejarah?

Mirip dengan para pendahulunya, presiden Gus Dur di awal pemerintahannya memberikan suatu garis besar kebijakan politiknya. Jika Soekarno dan Soeharto masing-masing muncul dengan warna anti penjajahan dan jargon pembangunan, ia tampil dengan konsep yang berbeda. Gus Dur memahami wujud bangsa Indonesia mencakup rentang wilayah Sabang hingga Merauke, minus Timor Timur. Sedangkan jati diri bangsa Indonesia ingin dibangunnya ke arah bentuk yang demokratis, berorientasi pada pasar bebas, serta bersatu dan berdaulat. Namun konteks Gus Dur dalam hal ini berbeda, pada awal pemerintahan para pendahulunya, jargon mereka selain diterima secara antusias relatif berhasil ketidakpuasan daerah, sedangkan ia mendapatkan potensi disintegrasi telah mencapai stadium yang parah. Misalnya rakyat Aceh telah merasa dua kali diperlakukan tidak adil dan represif, yaitu di masa Soekarno dan lebih parah lagi pada masa Soeharto. Apalagi pada masa keemasan “semu” Orde Baru mereka sempat

merasakan nikmat “kemajuan” meski tanpa keadilan dan kebebasan. Setelah krisis, mereka tidak memperoleh keduanya. Sehingga tuntutan separatisme kini telah berada pada titik puncak yang memprihatinkan.

Gus Dur di satu sisi tampaknya kini lebih tenggelam pada langkah penyelesaian jangka pendek dari potensi integrasi bangsa, yaitu sibuk dengan penyelesaian kasus Aceh. Ia lebih tampak keluar dengan solusi pemberian kesempatan referendum, meskipun mendapat tantangan keras DPR. Langkah referendum, apa pun isi dan hasilnya, merupakan hal yang elok dari kaca mata “kebebasan”. Namun sebenarnya bukan solusi yang menyeluruh untuk menyentuh akar persoalan. Ia dapat saja dilihat dalam perspektif berbeda, misalnya sebagai solusi dua dimensi yang mencerminkan sikap “patah arang” dan “egois” daerah di satu sisi, dan sikap “frustasi” dan tidak mau susah pemerintah pusat di sisi lain. Sebagai contoh, jika sebuah negara bagian di Kanada (Quebeck), Amerika Serikat (Hawaii), Jerman (Bayern), atau Jepang (Okinawa); Cina (Hongkong); mengemukakan tuntutan untuk merdeka melalui referendum; pasti pemerintah pusat tidak serta merta mengiyakan seperti Gus Dur atas Aceh. Selain terkait dengan persoalan keabsahan dari segi hukum internasional (konvensi Geneva) mengenai kedaulatan suatu negara, juga hal ini berkaitan dengan penempatan wacana demokrasi dan liberalisasi pada proporsi sebenarnya. Liberalisasi bukan berarti membuka keran air kebebasan dengan sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya, hingga tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menghentikannya. Pada titik ini liberalisasi dan demokrasi harus difahami ke arah pembentukan wahana masyarakat multikultur yang berdaya, yang mampu menjadi penyeimbang negara. Sehingga liberalisasi dan demokrasi bukan berarti membolehkan semua hal termasuk memberikan kesempatan referendum secara mudah pada daerah, yang mungkin tidak akan dilakukan oleh negara demokratis-liberal manapun di dunia.

Hingga di sini, perdebatan mengenai penyelesaian Aceh akhirnya mengarah pada upaya alternatif dari referendum. Dalam kaitan ini segala daya dan kemampuan dialog empatis perlu dimobilisir agar kesalahpahaman dan emosi meluap dari daerah dapat dikurangi. Apakah kebanyakan orang Jawa, kota dan kawasa Barat Indonesia tertentu kaya, diperlakukan adil, memperoleh kebebasan dan kebahagiaan selama 54 tahun merdeka? Barangkali jika kebanyakan rakyat Aceh atau daerah lain melihat realitasnya, mereka akan bersikap lain. Kemiskinan dan ketidakadilan terjadi dimana-mana, bahkan

di Jakarta. Oleh karena itu rakyat di Jakarta dengan dimotori mahasiswa bangkit mendengungkan reformasi total untuk keluar dari lingkaran setan yang tercipta selama dua atau tiga rejim terdahulu yang korup dan bobrok. Di sini perlu diketuk solidaritas rakyat di daerah atas apa yang dialami oleh “*silent majority*” di luar kawasan mereka, misalnya kaum papa, mahasiswa dan sebagainya yang berkorban demi pembaharuan. Lebih penting lagi, dalam dialog empati perlu disampaikan bahwa dalam melihat bangunan negara tidak dapat selalu hitam putih, setiap rejim memiliki konteksnya sendiri dalam sejarah. Negara Indonesia masa Soekarno berkuasa merupakan representasi masyarakat pasca kolonial yang penuh problema warisan penjajahan. Pada era Soeharto dan Habibie masyarakat Indonesia tengah menempuh peralihan dari pola lama ke pola baru lengkap dengan segala kekurangan dan penyelewengannya. Sedangkan pemerintahan Gus Dur berdiri di tengah berakhirnya era masyarakat pasca kolonialisme. Pada titik ini mulai dilakukan restrukturisasi struktur masyarakat yang lebih adaptif dalam tata pergaulan nasional dan internasional yang kian transparan dan dekat satu sama lain secara sosial, politik dan ekonomi.

Selain menempuh langkah jangka pendek seperti menyelesaikan tuntutan separatisme, persoalan di sekitar membangun negara bangsa sebagai problematik konstruksi sosial tidak boleh dilupakan pemerintahan Gus Dur. Sejarah mengatakan bahwa penafian atas proses ini membawa biaya sosial yang tinggi demi dipertahankan integrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis. Bahkan terwariskan secara antar rejim ibarat suatu “kutukan” atas dilupakannya proses di atas. Salah langkah pemupukan kehidupan bangsa sebagai bagian problematik sosial ini adalah integrasi wilayah. Hal ini salah satunya dapat ditempuh melalui pembangunan di sektor perhubungan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan kontak antar wilayah yang lebih lancar. Tentu saja hal ini merupakan cara pandang baru dari pembangunan sektor perhubungan yang biasanya berorientasi teknis dan ekonomi, menjadi berbasis sosial dan kultural. Integrasi kekerabatan dapat ditumbuhkan melalui ikatan perkawinan, ekonomi, emosional dan sebagainya. Untuk keperluan ini pemerintah dapat menempuh kebijakan pengadaan media hukum, sosial dan ekonomi yang lebih kondusif. Sebagai salah satu contoh yang sederhana diciptakan aturan hukum yang bersifat inklusif bagi pembentukan institusi sosial tertentu.

Ikatan ekonomi antar wilayah dapat ditempuh dalam mekanisme pasar regional, yaitu terdapat spesialisasi produk yang dijalin dalam proses “bersama” yang saling terkait. Sementara itu integrasi politik dilakukan melalui peranan pemerintah pusat dalam menyatukan orang-orang melalui sistem keadilan dan demokrasi yang “benar”, administrasi fiskal dan pendapatan yang “bersih dan bertanggungjawab”, aliansi politik yang diterima secara bersama, bahkan rekrutmen birokrasi yang lintas wilayah. Terakhir, integrasi kultural perlu dipupuk agar tercipta sistem nilai, norma, bahasa, simbol, ritual dan sejarah bersama. Misalnya dengan mengambil elemen kebudayaan daerah dalam mosaik kehidupan sosio-kultural nasional.